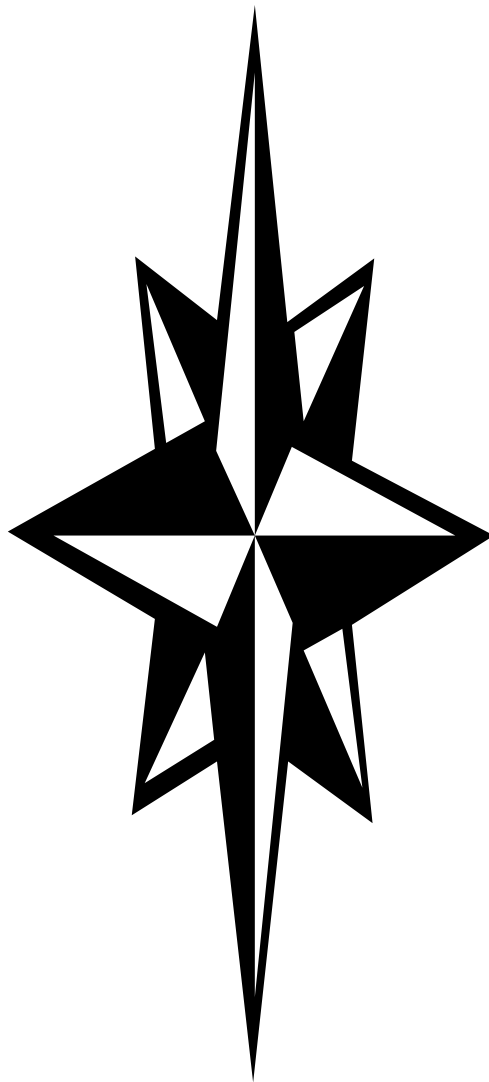


LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2018



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widi Wasa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli pada Kegiatan Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan. LKjIP adalah merupakan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap tugas pokok dan fungsinya.

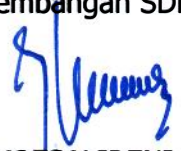
Tersusunnya LKjIP ini tidak lepas dari adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangli, 1 Pebruari 2019

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli,




NI PUTU KOESALIRENI, SH.,MT

NIP. 19610215 199203 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Pembentukan	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Struktur dan Susunan Organisasi	3
E. Sistematika Penyajian	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 7
A. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	7
B. Rencana Strategis	11
C. Visi dan Misi	12
D. Arah Kebijakan Umum dan Strategi.....	14
E. Tujuan dan Sasaran	15
F. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja	16
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 22
A. Pengukuran Kinerja	22
B. Evaluasi Kinerja	31
C. Analisis Pencapaian Kinerja	32
D. Keuangan Akuntabilitas	34
 BAB IV PENUTUP	 35

LAMPIRAN :

1. Rencana Strategik (RENSTRA)
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
6. Rencana Aksi PD
7. Cascading PD

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik serta merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli selama Tahun 2018. Sasaran Strategik itu diwujudkan melalui 8 program dan 36 kegiatan strategis. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli cukup berhasil mewujudkan/mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian tersebut di atas maka Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) termasuk katagori baik dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan.

Kendala yang dihadapi selama ini oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran penanganan administrasi kepegawaian.
2. Terkait dengan sumber daya manusia (SDM) masih membutuhkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya, terutama yang memiliki keahlian dalam bidang komputer jaringan/IT.
3. Terlambatnya pengiriman data-data kepegawaian dari masing-masing PD.
4. Kurangnya sarana mobilitas pendukung merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan tugas terutama untuk mengirim dan mengurus berkas kepegawaian ke instansi vertikal.

Namun demikian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli akan terus berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Selama ini Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menggunakan perangkat hukum yang berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan daerah yang ada dalam menjalankan tugas pemerintahan, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.

Bangli, 1 Pebruari 2019
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dan Pengembangan SDM
Kabupaten Bangli,



NI PUTU KOESALIRENI, SH.,MT
NIP. 19610215 199203 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sistem pemerintahan mengalami banyak perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini diwujudkan dengan terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pelaksanaan otonomi daerah yang digulirkan pemerintah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, salah satu diantaranya adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka pemerintah di daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangli dituntut agar mampu mengelola dan menyelenggarakan pelayanan dengan lebih berkualitas.

Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kepegawaian Daerah diwajibkan menyusun LKjIP setiap tahun didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan dokumen penting sebagai wujud pertanggungjawaban yang merefleksikan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. LKjIP tersebut merupakan dokumen penting bagi Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembangunan di bidang kepegawaian sehingga terlaksana secara efisien, efektif dan terarah.

B. Dasar Pembentukan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan Badan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 23 Nopember 2016, sebagai ketentuan

pelaksanaan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dipertegas lagi dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Bangli telah ditetapkan dan dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian daerah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bangli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah, dimana Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

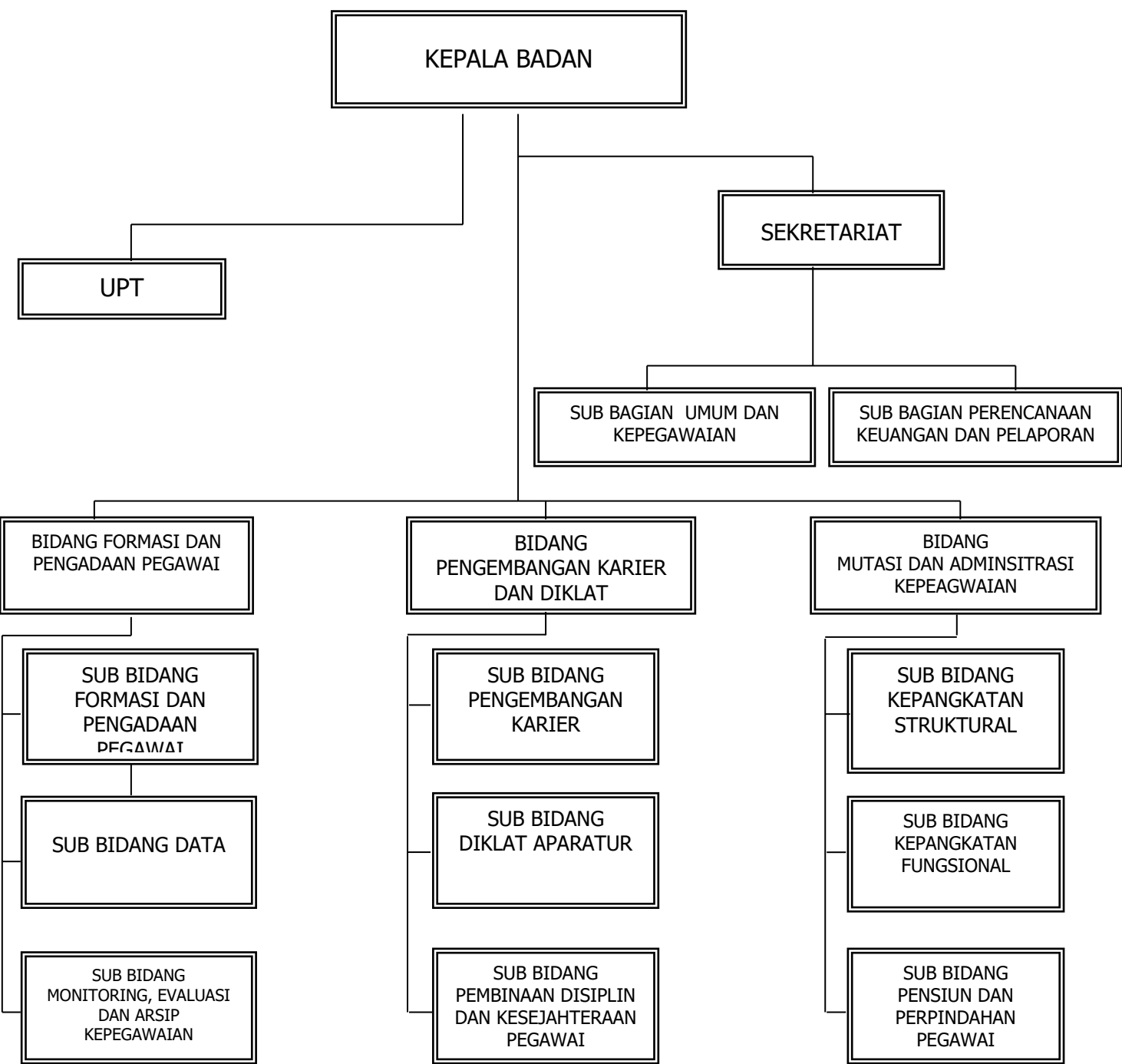
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang kepegawaian dan Pengembangan SDM yang menjadi kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, juga menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

D. Struktur dan Susunan Organisasi

1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :



2. SUSUNAN ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli merupakan Badan Tipe B, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang-bidang;
4. Sub Bagian-Sub Bagian;
5. Sub Bidang-Sub Bidang;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan fungsional.

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

3. Bidang-bidang dimaksud terdiri dari :

- a. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Bidang Pengembangan Karier dan Diklat;
- c. Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

A. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang formasi dan Pengadaan Pegawai;
- b. Sub Bidang Data; dan
- c. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Arsip Kepegawaian.

B. Bidang Pengembangan Karier dan Diklat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Karier;

- b. Sub Bidang Diklat Aparatur; dan
 - c. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
- C. Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kepangkatan Struktural;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan Fungsional; dan
 - c. Sub Bidang Pensiun dan Perpindahan Pegawai.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli didukung oleh 53 orang Pegawai Negeri Sipil yang dirinci berdasarkan golongan sebagai berikut :

- 1. Golongan IV : 4 orang
- 2. Golongan III : 27 orang
- 3. Golongan II : 14 orang dan
- 4. Pegawai tidak tetap : 6 orang

Terdiri dari :

- 1. Kepala Badan : 1 orang
- 2. Sekretaris : - orang
- 3. Kepala Bidang : 3 orang
- 4. Kasubag/Kasubid : 11 orang
- 5. Staf/Fungsional Umum : 30 orang dan
- 6. Pegawai Tidak Tetap : 6 orang

Diukur dari tingkat pendidikannya dapat kami sajikan pada tabel berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	SMA	23	
4	D1	-	
5	D2	-	
6	D3	1	
7	S1/Sarjana	21	
8	S2/Pasca Sarjana	6	
	Jumlah	51 orang	

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

- BAB I :** Merupakan pendahuluan yang memuat hal-hal umum tentang dasar pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM, Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.
- BAB II :** Memuat uraian singkat mengenai Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli serta rencana stratejik dan rencana kerja. Uraian singkat rencana kerja, tujuan, dan sasaran pada tahun yang bersangkutan, terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dengan program serta indikator keberhasilan pencapaiannya.
- BAB III :** Bab ini merupakan akuntabilitas kinerja yang memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.
- BAB IV :** Merupakan penutup yang mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi yang berkaitan dengan kinerja instansi Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

1. Perencanaan

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pada pasal 7 (1) disebutkan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan dan penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya : program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.

2. Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KELUARAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA / TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan PNS yang mengikuti Diklat	1 Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	a. Masukan: Dana	Rupiah	75.865.000	
				b. Keluaran: Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	50	
				c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	50	
		Persentase peningkatan CPNS yang mengikuti	2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan	a. Masukan: Dana	Rupiah	100.890.000	
				b. Keluaran:	Orang	45	

2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	diklat prajabatan			Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat prajabatan			
					c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan CPNS	Orang	45	
		Persentase peningkatan ASN yang mengikuti Diklat	3	Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	a. Masukan: Dana	Rupiah	69.000.000	
					b. Keluaran: Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	3	
					c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	3	
		Persentase PNS yang mendapat penghargaan	4	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	a. Masukan: Dana	Rupiah	200.000	
					b. Keluaran: Jumlah PNS yang berprestasi	orang	100	
					c. Hasil : Meningkatnya PNS yang berprestasi	orang	100	
		Persentase penurunan PNS yang melanggar disiplin	5	Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS	a. Masukan: Dana	Rupiah	3.345.000	
					b. Keluaran: Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	kali	25	
					c. Hasil: Meningkatnya disiplin PNS	kali	25	
		Persentase peningkatan jumlah calon pejabat pimpinan tinggi	6	Pelaksanaan Seleksi Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi	a. Masukan: Dana	Rupiah	330.210.000	
					b. Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	Orang	63	
					c. Hasil: Lulusnya PNS yang mengikuti seleksi	orang	63	
		Persentase peningkatan jumlah PNS yang telah disumpah	7	Pengambilan sumpah Pegawai negeri Sipil	a. Masukan: Dana	Rupiah	1.200.000	
					b. Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	Orang	45	
					c. Hasil: Jumlah PNS yang telah diambil sumpahnya	orang	45	
		Persentase terisinya jabatan struktural yang lowong	8	Pelantikan pejabat struktural	a. Masukan: Dana	Rupiah	13.400.000	
					b. Keluaran: Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2	
					c. Hasil: Meningkatnya jumlah	kali	2	

3	Program Perencanaan Aparatur	Persentase peningkatan terbitnya SK pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	9	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	a	pelantikan yang dilaksanakan Masukan: Dana	Rupiah	2.600.000	
					b	Keluaran: Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	Orang	250	
					c	Hasil: Meningkatnya jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	orang	250	
		Persentase peningkatan lulusnya PNS yang mengikuti uji kompetensi	10	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	a	Masukan: Dana	Rupiah	73.500.000	
					b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	Orang	21	
					c	Hasil: Lulusnya PNS yang mengikuti uji kompetensi	orang	21	
		Persentase peningkatan jumlah peraturan perundang-undangan yang tersoislisasi	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	a	Masukan: Dana	Rupiah	5.265.000	
					b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	Orang	100	
					c	Hasil: Jumlah meningkatnya pengetahuan PNS yang mengikuti sosialisasi	orang	100	
		Persentase peningkatan Pemberkasannya CPNS	12	Pemberkasannya Calon Pegawai Negeri Sipil	a.	Masukan: Dana	Rupiah	2.500.000	
					b	Keluaran: Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	Orang	45	
					c	Hasil: Jumlah terbitnya SK CPNS	orang	45	
		Persentase peningkatan pengisian dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan	13	Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai	a	Masukan: Dana	Rupiah	6.897.500	
					b	Keluaran: Jumlah tersusunnya profil bezeting	dokumen	1	
					c	Hasil: Tersusunnya bezeting dan formasi pegawai	dokumen	1	

4	Program Pelayanan Aparatur	Persentase terdatanya PNS	14	Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	a	Masukan: Dana	Rupiah	9.000.000	
					b	Keluaran: Jumlah profil kepegawaian yang disusun	dokumen	1	
					c	Hasil: Meningkatnya validitas data PNS	dokumen	1	
		Persentase peningkatan penyediaan data kepegawaian yang valid dan lengkap	15	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	a.	Masukan: Dana	Rupiah	3.437.000	
					b	Keluaran: Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG	orang	5.450	
					c	Hasil: Tersajinya data kepegawaian yang valid dan lengkap	orang	5.450	
		Persentase peningkatan pelayanan terhadap PNS yang mengurus usul pensiun	16	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	a	Masukan: Dana	Rupiah	7.000.000	
					b	Keluaran: Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	orang	120	
					c	Hasil: Terbitnya SK pensiun PNS dan Janda/Dudanya	orang	120	
		Persentase peningkatan PNS fungsional yang naik pangkat	17	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS	a	Masukan: Dana	Rupiah	10.000.000	
					b	Keluaran : Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	540	
					c	Hasil: Terbitnya SK kenaikan pangkat PNS fungsional	orang	540	
		Persentase peningkatan PNS struktural yang naik pangkat	18	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	a	Masukan: Dana	Rupiah	10.000.000	
					b	Keluaran : Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	400	
					c	Hasil: Terbitnya SK kenaikan pangkat PNS struktural	orang	400	
		Persentase peningkatan PNS yang naik pangkat golongan	19	Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan	a	Masukan: Dana	Rupiah	9.000.000	
					b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	orang	30	

				c	Hasil: Meningkatnya karier PNS sesuai jenjang keangkatan	orang	30	
		Persentase terbitnya SK perpindahan PNS	20	a	Masukan : Dana	Rupiah	5.000.000	
				b	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja antar Provinsi/Kabupaten/kota	Orang	50	
				C	Hasil : Jumlah terbitnya SK perpindahan PNS	Orang	50	

B. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli agar mampu menjawab tuntutan lingkungan srategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dapat lebih menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

1. Dalam jangka panjang adalah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintahan dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih, jujur, disiplin, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab dan sejahtera.
2. Dalam Jangka Menengah adalah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional dan dapat memberikan pelayanan prima.
3. Dalam Jangka Pendek adalah :
 - a. Mewujudkan sistem perencanaan pegawai yang komprehensif;
 - b. Menyediakan informasi kepegawaian yang valid melalui penyediaan data yang akurat dan lengkap;
 - c. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

C. Visi dan Misi

- Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Dalam rangka mengejawantahkan visi Kabupaten Bangli sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, yaitu: *"Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan Masyarakat Bangli yang GITA SANTI "*, dengan 9 (sembilan) Misi untuk mendukung pencapaian Visi tersebut yaitu :

1. Membangkitkan perekonomian lokal

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan pedesaan melalui penataan pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Membangkitkan produktifitas pertanian dan perikanan menuju ketahanan pangan
- c. Membangkitkan produktifitas perekonomian lokal

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Dengan tujuan :

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah

3. Pembenahan tata kelola obyek wisata

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola obyek wisata
- b. Meningkatkan tata kelola obyek wisata

4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan

Dengan tujuan

Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran

5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan

Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- b. Meningkatkan kualitas manajemen pariwisata
- c. Meningkatkan kualitas manajemen lingkungan
- d. Meningkatkan kreatifitas serta prestasi pemuda dan olah raga
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip dan perpustakaan

6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah

Dengan tujuan :

- a. Memperkuat kelembagaan aparatur pemerintah

- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat
- c. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- 7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien
Dengan tujuan :
 - a. Memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah
 - b. Meningkatkan penegakan hukum demi keamanan, kenyamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 - c. Mengembangkan inovasi-inovasi daerah
- 8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
Dengan tujuan :
Mengembangkan UMKM berbasis ekonomi kreatif
- 9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal
Dengan tujuan :
Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan Visinya tentu harus mengacu pada Visi Kabupaten Bangli dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Dengan perubahan paradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah :

"Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkualitas, gigih, bekerja keras, ikhlas, takwa dan aspiratif untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat"

- Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menyusun langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam misi sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja;
5. Pelaksanaan upacara Nasional, Daerah dan keagamaan dan;
6. Pembinaan dan pengembangan aparatur

D. Arah dan Kebijakan Umum dan Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli menetapkan arah kebijakan umum dan strategi yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut :

Misi 1 : Pelayanan administrasi perkantoran

Strategi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan administrasi

Kebijakan :

Konsistensi dalam penyediaan alat kelengkapan perkantoran

Misi 2 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Strategi :

1. Koordinasi dengan pihak ULP
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas barang

Kebijakan :

Konsistensi dalam pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Misi 3 : Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Strategi :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat

Kebijakan :

Konsistensi penerapan standar kompetensi dalam penempatan pegawai

Misi 4 : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Strategi :

Sinergitas pelaporan kinerja dengan peraturan perundang-undangan

Kebijakan :

Konsistensi pengelolaan keuangan dan kinerja PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Misi 5 : Pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan

Strategi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana upacara

Kebijakan :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan pelaksanaan upacara

Misi 6 : Pembinaan dan pengembangan aparatur

Strategi :

1. Pemanfaatan IT dan pelayanan administrasi pegawai
2. Koordinasi dengan Bagian Organisasi untuk mengoptimalkan penyusunan Anjab.

Kebijakan :

Konsistensi dalam penerapan administrasi kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

E. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi organisasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penetapan tujuan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli tidak terlepas dari kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan negara, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggara negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme, serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi kerja. Berdasarkan hal tersebut tujuan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya aparatur yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu kepada seluruh masyarakat; dan
2. Terwujudnya aparatur yang gigih, ikhlas, takwa, dan aspiratif yang dilandasi rasa bakti pada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, hormat kepada sesama manusia serta peduli pada lingkungan guna mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

b. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran yang spesifik dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai (realitas). Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli antara lain :

1. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mampu memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih efisien dan optimal;
2. Tersedianya sarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai;
3. Terwujudnya pemerintah yang bersih, demokratis, bertanggung jawab efisien, efektif dan produktif untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan rasa keimanan dan rasa sradha bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan aparatur yang jujur, bersih, dan bertanggung jawab; dan
5. Meningkatkan inovasi dan kreativitas yang dilandasi rasa bakti pada Tuhan Yang Maha Esa, bakti pada sesama manusia, serta bakti pada lingkungan untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.

F. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

1. Rencana Kinerja

Sebagai landasan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dapat dirangkum dari seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh semua perangkat pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dapat diuraikan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan makanan dan minuman
- II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan :
- Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS
- IV. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
 - Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
 - Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan
- V. Program Pendidikan dan Pelatihan
- Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah
 - Pendidikan dan pelatihan prajabatan
 - Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar
- VI. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan :
- Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi
 - Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS
 - Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil
 - Pelantikan pejabat struktural
 - Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional
- VII. Program Perencanaan Aparatur
- Sosialisai peraturan perundang-undangan
 - Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil
 - Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai
 - Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil
 - Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
- VIII. Program Pelayanan Aparatur
- Penyelenggaraan usul pension Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS
 - Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS
 - Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan

- Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Penetapan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas maka dapat diuraikan Penetapan Kinerja Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN				KET
	URAIAN	INDIKATOR KELUARAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA / TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan PNS yang mengikuti Diklat	1 Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	a. Masukan: Dana	Rupiah	75.865.000	
				b. Keluaran: Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	50	
				c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	50	
		Persentase peningkatan CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	2 Pendidikan dan pelatihan prajabatan	a. Masukan: Dana	Rupiah	100.890.000	
				b. Keluaran: Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat prajabatn	Orang	45	
				c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan CPNS	Orang	45	
		Persentase peningkatan ASN yang mengikuti Diklat	3 Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	a. Masukan: Dana	Rupiah	69.000.000	
				b. Keluaran: Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	3	
				c. Hasil : Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	3	
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase PNS yang mendapat penghargaan	4 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	a. Masukan: Dana	Rupiah	200.000	
				b. Keluaran: Jumlah PNS yang berprestasi	orang	100	
				c. Hasil : Meningkatnya PNS yang berprestasi	orang	100	
		Persentase penurunan PNS yang melanggar disiplin	5 Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS	a. Masukan: Dana	Rupiah	3.345.000	
				b. Keluaran:	kali	25	

					Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan			
				c	Hasil: Meningkatnya disiplin PNS	kali	25	
	Persentase peningkatan jumlah calon pejabat pimpinan tinggi	6	Pelaksanaan Seleksi Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi	a	Masukan: Dana	Rupiah	330.210.000	
				b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	Orang	63	
				c	Hasil: Lulusnya PNS yang mengikuti seleksi	orang	63	
	Persentase peningkatan jumlah PNS yang telah disumpah	7	Pengambilan sumpah Pegawai negeri Sipil	a	Masukan: Dana	Rupiah	1.200.000	
				b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	Orang	45	
				c	Hasil: Jumlah PNS yang telah diambil sumpahnya	orang	45	
	Persentase terisnya jabatan struktural yang lowong	8	Pelantikan pejabat struktural	a	Masukan: Dana	Rupiah	13.400.000	
				b	Keluaran: Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2	
				c	Hasil: Meningkatnya jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2	
	Persentase peningkatan terbitnya SK pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	9	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	a	Masukan: Dana	Rupiah	2.600.000	
				b	Keluaran: Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	Orang	250	
				c	Hasil: Meningkatnya jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	orang	250	
	Persentase peningkatan lulusnya PNS yang mengikuti uji kompetensi	10	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	a	Masukan: Dana	Rupiah	73.500.000	
				b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	Orang	21	
				c	Hasil: Lulusnya PNS yang mengikuti uji kompetensi	orang	21	

3	Program Perencanaan Aparatur	Persentase peningkatan jumlah peraturan perundang-undangan yang tersolisasi	11	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	a	Masukan: Dana	Rupiah	5.265.000	
					b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	Orang	100	
					c	Hasil: Jumlah meningkatnya pengetahuan PNS yang mengikuti sosialisasi	orang	100	
		Persentase peningkatan Pemberkasan CPNS	12	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	a.	Masukan: Dana	Rupiah	2.500.000	
					b	Keluaran: Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	Orang	45	
					c	Hasil: Jumlah terbitnya SK CPNS	orang	45	
		Persentase peningkatan pengisian dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan	13	Penyusunan Bezeting dan Formasi Pegawai	a	Masukan: Dana	Rupiah	6.897.500	
					b	Keluaran: Jumlah tersusunnya profil bezeting	dokumen	1	
					c	Hasil: Tersusunnya bezeting dan formasi pegawai	dokumen	1	
		Persentase terdatanya PNS	14	Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	a	Masukan: Dana	Rupiah	9.000.000	
					b	Keluaran: Jumlah profil kepegawaian yang disusun	dokumen	1	
					c	Hasil: Meningkatnya validitas data PNS	dokumen	1	
		Persentase peningkatan penyediaan data kepegawaian yang valid dan lengkap	15	Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	a.	Masukan: Dana	Rupiah	3.437.000	
					b	Keluaran: Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG	orang	5.450	
					c	Hasil: Tersajinya data kepegawaian yang valid dan lengkap	orang	5.450	
4	Program Pelayanan Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan terhadap PNS yang mengurus usul pensiun	16	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	a	Masukan: Dana	Rupiah	7.000.000	

				b	Keluaran: Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	orang	120	
				c	Hasil: Terbitnya SK pensiun PNS dan Janda/Dudanya	orang	120	
	Persentase peningkatan PNS fungsional yang naik pangkat	17	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS	a	Masukan: Dana	Rupiah	10.000.000	
				b	Keluaran : Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	540	
				c	Hasil: Terbitnya SK kenaikan pangkat PNS fungsional	orang	540	
	Persentase peningkatan PNS struktural yang naik pangkat	18	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	a	Masukan: Dana	Rupiah	10.000.000	
				b	Keluaran : Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	400	
				c	Hasil: Terbitnya SK kenaikan pangkat PNS struktural	orang	400	
	Persentase peningkatan PNS yang naik pangkat golongan	19	Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan	a	Masukan: Dana	Rupiah	9.000.000	
				b	Keluaran: Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	orang	30	
				c	Hasil: Meningkatnya karier PNS sesuai jenjang kepangkatan	orang	30	
	Persentase terbitnya SK perpindahan PNS	20	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Provinsi/kabupaten/Kota	a	Masukan : Dana	Rupiah	5.000.000	
				b	Keluaran : Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja antar Provinsi/Kabupaten/kota	Orang	50	
				C	Hasil : Jumlah terbitnya SK perpindahan PNS	Orang	50	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan M isi Badan Kepegawai Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.

Berikut ini Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2018 sebagai berikut :

KEGIATAN						PERSENTASE	KET
URAIAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA / TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN TARGET	
2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	a. Masukan					
		Dana	Rupiah	7.095.000	5.640.000	79,49 %	
		b. Keluaran					
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah materai dan benda pos lainnya	lembar	1.500	1.148	76,53 %	
		c. Hasil					
		Lancarnya administrasi perkantoran	lembar	1.500	1.148	76,53 %	
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	a. Masukan					
		Dana	Rupiah	55.920.000	25.169.690	45,01 %	
		b. Keluaran					
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100 %	
		c. Hasil					
		Jumlah biaya telepon	bulan	12	12	100 %	
5	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	a. Masukan					
		Dana	Rupiah	4.200.000	2.513.300	59,84 %	
		b. Keluaran					
6	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	unit	10	10	100 %	
		c. Hasil					
		Terurusnya perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	10	100 %	
7	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	a. Masukan					
		Dana	Rupiah	28.237.200	19.008.100	67,32 %	
		b. Keluaran					
8	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan	jenis	12	12	100 %	
		c. Hasil					
		Terjaganya Kebersihan Kantor	jenis	12	12	100 %	

5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	30.000.000	13.790.000	45,97 %	
		b	Keluaran					
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah perbaikan peralatan kerja	unit	35	35	100 %	
		c	Hasil					
			Terpeliharanya peralatan kerja	unit	35	35	100 %	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	72.860.500	62.963.700	86,42 %	
		b	Keluaran					
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah alat tulis kantor	jenis	59	59	100 %	
		c	Hasil					
			Lancarnya administrasi kantor	jenis	59	59	100 %	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	14.906.400	11.939.400	80,10 %	
		b	Keluaran					
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah barang cetak dan penggandaan	jenis	12	12	100 %	
		c	Hasil					
			Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	jenis	12	12	100 %	
11	Penyediaan makanan dan minuman	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	3.084.300	2.715.500	88,04 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	9	9	100 %	
		c	Hasil					
			Terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	9	9	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	75.000.000	49.660.000	66,21 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah peralatan perlengkapan kantor	unit	10	8	80 %	
		c	Hasil					
			Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	10	8	80 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	5.652.000	5.640.000	99,79 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	2.160	2.160	100 %	
		c	Hasil					
			Tersedianya surat kabar	eks	2.160	2.160	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	13.320.000	3.000.000	22,52 %	

12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	b	Keluaran					
			Jumlah makanan dan minuman	kotak	1.000	1.000	100 %	
		c	Hasil					
			Tersedianya makanan dan minuman	kotak	1.000	1.000	100 %	
13	Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium Non PNS	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	79.745.700	62.622.500	78,53 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	2	2	100 %	
14	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional	c	Hasil					
			Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	2	2	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	71.310.744	71.310.744	100 %	
15	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah	b	Keluaran					
			Jumlah biaya honorarium PTT	orang	6	6	100 %	
		c	Hasil					
			Terbayarnya honorarium PTT	orang	6	6	100 %	
16	Kegiatan Pelaksanaan Upacara keagamaan	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	9.400.000	8.250.000	87,77 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar nasional	Kali	1	1	100 %	
17	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	c	Hasil					
			Lancarnya pelaksanaan hari besar nasional	Kali	1	1	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	5.000.000	4.950.000	99,00 %	
18	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	b	Keluaran					
			Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah	Kali	1	1	100 %	
		c	Hasil					
			Lancarnya pelaksanaan hari daerah	Kali	1	1	100 %	
19	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	43.865.259	42.775.000	97,51 %	
		b.	Keluaran					
			Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	bulan	12	12	100 %	
20	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	c.	Hasil					
			Lancarnya pelaksanaan upacara keagamaan	bulan	12	12	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	75.865.000	74.610.000	98,35 %	
21	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	b	Keluaran					
			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	50	50	100 %	

18	Pendidikan dan pelatihan prajabatan	c	Hasil Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	50	50	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	100.890.000	100.890.000	100 %	
		b	Keluaran					
19	Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar		Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	Orang	45	45	100 %	
		c	Hasil Bertambahnya pengetahuan CPNS	Orang	45	45	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	69.000.000	0	0 %	
20	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	b	Keluaran					
			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	3	0	0 %	
		c	Hasil Bertambahnya pengetahuan ASN	orang	3	0	0 %	
		a.	Masukan					
21	Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS		Dana	Rupiah	200.000	200.000	100 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah PNS yang berprestasi	orang	100	618	618 %	
		c	Hasil Meningkatnya jumlah PNS yang berprestasi	orang	100	618	618 %	
22	Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	3.345.000	3.300.500	98,67 %	
		b	Keluaran					
			Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	kali	25	25	100 %	
23	Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	c	Hasil Meningkatnya disiplin PNS	kali	25	25	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	330.120.000	0	0 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	orang	63	0	0 %	
		c	Hasil Lulusnya PNS yang mengikuti seleksi	orang	63	0	0 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	1.200.000	1.195.000	99,58 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah PNS yang mengikuti Pengambilan sumpah	orang	45	45	100 %	
		c	Hasil Jumlah PNS yang telah diambil sumpahnya	orang	45	45	100 %	

24	Pelantikan pejabat struktural	a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	13.400.000	0	0 %	
		b.	Keluaran					
			Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2	0	0 %	
25	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	c.	Hasil					
			Meningkatnya jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2	0	0 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	2.600.000	2.600.000	100 %	
26	Pelaksanaan Uji Kompetensi jabatan pimpinan tinggi	b.	Keluaran					
			Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan	orang	250	297	118 %	
		c.	Hasil					
			Meningkatnya jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	orang	250	297	118 %	
27	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Dana	Rupiah	73.500.000	0	0 %	
		b.	Keluaran					
			Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi	Orang	21	0	0 %	
		c.	Hasil					
28	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil		Lulusnya PNS yang mengikuti uji kompetensi	Orang	21	0	0 %	
			Dana	Rupiah	5.265.000	5.034.000	95,61 %	
		b.	Keluaran					
			Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	Orang	100	100	100 %	
29	Penyusunan Bezeting dan formasi pegawai	c.	Hasil					
			Jumlah meningkatnya pengetahuan PNS yang mengikuti sosialisasi	Orang	100	100	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	2.500.000	2.456.000	98,24 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	orang	45	45	100 %	
		c	Hasil					
			Jumlah terbitnya SK CPNS	orang	45	45	100 %	
		a.	Masukan					
			Dana	Rupiah	6.897.500	6.867.000	99,56 %	
		b	Keluaran					
			Jumlah tersusunnya profil bezeting	dokumen	1	1	100 %	
		c	Hasil					

30	Pendataan dan Penataan Pegawai Negeri Sipil	a. Tersusunya Bezeting dan formasi pegawai Masukan	dokumen	1	1	100 %
		b. Dana Keluaran	Rupiah	9.000.000	6.902.000	76,69 %
		c. Jumlah Profil kepegawaian yang disusun Hasil	dokumen	1	1	100 %
31	Penyelenggaraan Pengembangan system informasi kepegawaian daerah	a. Meningkatnya validitas data pegawai Masukan	dokumen	1	1	100 %
		b. Dana Keluaran	Rupiah	3.437.000	733.000	21,33 %
		c. Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG Hasil	orang	5.450	5.450	100 %
32	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	a. Tersajinya data kepegawaian yang valid dan lengkap	orang	5.450	5.450	100 %
		b. Masukan				
		c. Dana Keluaran	Rupiah	7.000.000	4.444.000	63,49 %
33	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS	a. Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan Hasil	orang	120	150	125 %
		b. Terbitnya SK pensiun PNS dan janda/dudanya Masukan	orang	120	150	125 %
		c. Dana Keluaran	Rupiah	10.000.000	5.586.000	55,86 %
34	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	a. Jumlah PNS Fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya Hasil	orang	540	615	113 %
		b. Terbitnya SK kenaikan pangkat fungsional Masukan	orang	540	615	113 %
		c. Dana Keluaran	Rupiah	10.000.000	4.652.000	46,52 %
35	Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan	a. Jumlah PNS Struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya Hasil	orang	400	702	175 %
		b. Terbitnya SK kenaikan pangkat struktural Masukan	orang	400	702	175 %
		c. Dana Keluaran	Rupiah	9.000.000	190.000	2,11 %
		a. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas Hasil	orang	30	25	83,3 %
		b. Meningkatnya karier	orang	30	25	83,3 %

36	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja pegawai negeri sipil (PNS) antar Provinsi/Kabupaten/Kota	a. PNS sesuai jenjang kepangkatan Masukan					
		Dana	Rupiah	5.000.000	3.946.000	78,92 %	
		b. Keluaran					
		Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja antar Provinsi/Kabupaten/Kota	orang	50	192	384 %	
		c. Hasil					
		Jumlah terbitnya SK perpindahan PNS	orang	50	192	384 %	

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran, berikut ini kami sajikan Pengukuran Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kegiatan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KET
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	7.095.000	5.640.000	79,49 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	55.920.000	25.169.690	45,01 %	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.200.000	2.513.300	59,84 %	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	28.237.200	19.008.100	67,32 %	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30.000.000	13.790.000	45,97 %	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.860.500	62.963.700	86,42 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.906.400	11.939.400	80,10 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.084.300	2.715.500	88,04 %	
	Penyediaan Peralatan dan peralatan kantor	75.000.000	49.660.000	66,21 %	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.652.000	5.640.000	99,79 %	

	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.320.000	3.000.000	22,52 %	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	79.745.700,60	62.622.500	78,53 %	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS	71.310.744	71.310.744	100 %	
Program Pelaksanaan Upacara Hari Nasional, Daerah dan Keagamaan	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional	9.400.000	8.250.000	87,77 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah	5.000.000	4.950.000	99,00 %	
	Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan	43.865.259	42.775.000	97,51 %	
Program Pendidikan dan Pelatihan	Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	75.865.000	74.610.000	98,35 %	
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	100.890.000	100.890.000	100 %	
	Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	69.000.000	-	0 %	Tidak terealisasi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	200.000	200.000	100 %	
	Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS	3.345.000	3.300.500	98,67 %	
	Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	330.210.000	-	0 %	Tidak terealisasi
	Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil	1.200.000	25.587.600	99,42 %	
	Pelantikan pejabat struktural	13.400.000	-	0 %	Tidak terealisasi
	Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	2.600.000	2.600.000	100 %	
	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	73.500.000	-	0 %	Tidak terealisasi
Program Perencanaan Aparatur	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5.265.000	5.034.000	95,61 %	
	Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	2.500.000	2.456.000	98,24 %	

	Penyusunan bezeting dan formasi pegawai	6.897.500	6.867.000	99,56 %	
	Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil	9.000.000	6.902.000	76,69 %	
	Penyelenggaraan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	3.437.000	733.000	21,33 %	
Program Pelayanan Aparatur	Penyelenggaraan usul pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7.000.000	4.444.000	63,49 %	
	Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional PNS	10.000.000	5.586.000	55,86 %	
	Penyelenggaraan kenaikan pangkat struktural PNS	10.000.000	4.652.000	46,52 %	
	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	9.000.000	190.000	2,11 %	Realisasi 2,11 %
	Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar Provinsi/Kabupaten/Kota	5.000.000	3.946.000	78,92 %	

Secara umum Program Kegiatan yang direncanakan dapat memenuhi sasaran yang diinginkan. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dijalankan karena beberapa kendala yang kami sajikan dalam tabel berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	ALASAN	KETERANGAN
1	Diklat Teknis Substantif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	69.000.000	Tidak mendapat jadwal dari kementerian Keuangan, serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Dirasionalisasi
2	Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	330.210.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan PPK (Bupati) serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Dirasionalisasi
3	Pelantikan pejabat struktural	13.400.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud	Tidak terealisasi

			merupakan kebijakan PPK (Bupati)	
4	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	73.500.000	Ditunda pelaksanaannya karena kegiatan dimaksud merupakan kebijakan PPK (Bupati), serta kegiatan sudah dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Dirasionalisasi
5	Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	9.000.000	Dilaksanakan oleh BKD Provinsi Bali bekerjasama dengan Kantor Regional X BKN Denpasar, sampai batas waktu pengiriman peserta telahaan/ijin pelaksanaan kegiatan belum turun dari Bapak Bupati	Realisasi Rp. 190.000 (2,11 %)

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli sudah berusaha secara optimal dalam mengelola dana APBD agar berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Evaluasi Kinerja

Dari pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli dapat dievaluasi sebagai berikut :

1. Masih dibutuhkan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dengan unsur yang menangani masalah kepegawaian pada masing-masing unit kerja sehingga pelayanan administrasi kepegawaian terus dapat ditingkatkan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana, karena kemajuan pengetahuan dan teknologi membuat informasi dan pelayanan harus tepat dan cepat, karena itu diperlukan sarana sistem teknologi yang efektif dengan komputerisasi (SIMPEG dan SAPK) dalam memberi pelayanan pada pegawai.
3. Peningkatan kerjasama dengan badan diklat. Karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitasnya perlu mendapatkan perhatian khusus, serta adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan prima yang diberikan aparatur.

4. Keterbatasan anggaran untuk mendanai berbagai program/kegiatan serta sarana prasarana perlu ditingkatkan.

C. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 dapat di analisis pencapaian kinerja seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMDSB) Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, yang disajikan dalam tabel berikut :

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian Kinerja	Tahun 2018		Capaian Kinerja
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP dan tepat waktu	Orang	11.485	9.461	82,38 %	11.613	12.846	110,62 %
2 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	orang	30	37	123'33 %	50	37	74 %

Berdasarkan Rencana Kerja Tahunan dapat dianalisis keberhasilan, kegagalan dan hambatan serta kendala permasalahan yang dihadapi, berikut langkah-langkah antisipasinya :

1. Analisa keberhasilan dan kegagalan Program Kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangli adalah :

a. Sebab Keberhasilan :

- Tumbuhnya kesadaran pegawai akan pentingnya pengurusan administrasi kepegawaian;
- Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan administrasi kepegawaian;
- Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Adanya dana yang tersedia.

b. Sebab Kegagalan

Dapat dikatakan semua program kegiatan dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat berbagai kendala karena kebijakan pimpinan dan juga dalam pengiriman data-data kepegawaian dari masing-masing OPD, tetapi selama ini belum menimbulkan dampak yang signifikan.

2. Hambatan dan Kendala :

- a. Kurangnya Sumber daya manusia terutama yang memiliki keahlian dalam bidang Komputer/IT;
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran penanganan administrasi kepegawaian;
- c. Keterlambatan pengiriman data-data kepegawaian dari masing-masing PD;

3. Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi mengacu dari hambatan dan kendala tersebut di atas adalah sumber daya manusia, sarana prasarana perlu ditambah dan ditingkatkan, dan koordinasi dengan unsur-unsur yang menangani masalah kepegawaian baik dengan BKN maupun dengan masing-masing PD perlu ditingkatkan.

4. Langkah-langkah antisipasi

- a. Sumber daya yang di miliki secara keseluruhan harus lebih ditingkatkan terutama kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi dalam pelaksanaan Diklat Kepemimpinan serta Diklat Teknis lainnya.
- b. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah perlu ditingkatkan kualitasnya terutama dalam memanfaatkan teknologi komputer, untuk itu diperlukan tambahan tenaga yang ahli dibidang Komputer/IT,
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung terutama mobil dinas untuk pengurusan kenaikan pangkat, Karpeg, karis, karsu, KPE (Kartu Pegawai Elektronik), usul pensiun serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal
- d. Koordinasi dengan unsur-unsur yang menangani kepegawaian pada masing-masing PD perlu ditingkatkan untuk mempercepat proses administrasi kepegawaian.

D. Keuangan Akuntabilitas

Dana yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Tahun 2018 dengan DPA Nomor : 4.05.01/1500/DPA/2017, tanggal 29 Desember 2017, dan DPA Perubahan Nomor : 4.05.01/1167/DPPA/2018, tanggal 02 Nopember 2018, dijabarkan sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	TARGET	REALISASI	PROSENTASE
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	310.275.400,00	202.039.690,00	65,12 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.745.700,60	62.622.500,00	78,53 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.310.744,00	71.310.744,00	100 %
4.	Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan	58.265.259,00	55.975.000,00	96,07 %
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan	176.755.000,00	175.500.000,00	99,29 %
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20.745.000,00	7.295.500,00	35,17 %
7.	Program Perencanaan Aparatur	27.099.500,00	21.992.000,00	81,15 %
8.	Program Pelayanan Aparatur	41.000.000,00	18.818.000,00	45,90 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. LKjIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli kepada publik.

Dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli secara umum dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan dapat mencapai sasaran, dengan simpulan :

1. Dari 8 (delapan) program kegiatan yang telah ditetapkan pada Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli telah berhasil dijabarkan dan dilaksanakan ke dalam 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.
2. Dari hasil Pengukuran Kinerja baik efektifitas maupun efisiensinya sebagian besar telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Kendala yang dialami adalah keterbatasan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli serta adanya beberapa kebijakan PPK dalam hal ini Bupati dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, maka perlu ditempuh pendekatan secara efektif baik kepada pemerintah Kabupaten, Propinsi ataupun dengan Pemerintah Pusat.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut dan atas kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Rencana Strategik (Renstra)
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Rencana Aksi Perangkat Daerah
7. Cascading Perangkat Daerah
8. Lain-lain yang dianggap perlu

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI

[illegible]

[illegible]

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TRIWULAN I TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN) (Rp)	RENCANA AKSI	TRIWULAN I TAHUN 2018		DATA PENDUKUNG	KENDALA	TINDAK LANJUT	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	245.755.000,00	Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat dalam peningkatan kompetensi pegawai	100.890.000,00	100.890.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan I			Program Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			424.455.000,00	Melakukan koordinasi dengan instansi Horizontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	419.605.000,00	12.879.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan I	Beberapa kegiatan tidak terealisasi	Dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			27.099.500,00	Melakukan koordinasi dengan BKN dan instansi vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	4.800.000,00	1.010.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan I			Program Perencanaan Aparatur	Bidang Formasi dan pengadaan Pegawai

			41.000.000,00	Melakukan koordinasi dengan intansi Horisontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	9.550.000,00	4.206.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan I			Program Pelayanan Aparatur	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
--	--	--	---------------	--	--------------	--------------	-----------------------------------	--	--	----------------------------	--

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TRIWULAN II TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN) (Rp)	RENCANA AKSI	TRIWULAN II TAHUN 2018		DATA PENDUKUNG	KENDALA	TINDAK LANJUT	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	245.755.000,00	Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat dalam peningkatan kompetensi pegawai	69.000.000,00	-	Laporan Evaluasi Renja Triwulan II	Kegiatan Diklat DTSS tidak mendapat jadwal dari Kemenkeu	Dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Program Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			424.455.000,00	Melakukan koordinasi dengan instansi Horisontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	2.850.000,00	17.748.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan II	Beberapa kegiatan tidak terealisasi	Dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			27.099.500,00	Melakukan koordinasi dengan BKN dan instansi vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	18.642.000,00	3.840.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan II			Program Perencanaan Aparatur	Bidang Formasi dan pengadaan Pegawai

			41.000.000,00	Melakukan koordinasi dengan intansi Horisontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	10.400.000,00	4.134.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan II			Program Pelayanan Aparatur	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
--	--	--	---------------	--	---------------	--------------	------------------------------------	--	--	----------------------------	--

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TRIWULAN III TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN) (Rp)	RENCANA AKSI	TRIWULAN III TAHUN 2018		DATA PENDUKUNG	KENDALA	TINDAK LANJUT	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	245.755.000,00	Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat dalam peningkatan kompetensi pegawai	75.865.000,00	74.610.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan III			Program Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			424.455.000,00	Melakukan koordinasi dengan instansi Horizontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	2.000.000,00	22.484.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan III	Beberapa kegiatan tidak terealisasi	Dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			27.099.500,00	Melakukan koordinasi dengan BKN dan instansi vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	2.657.000,00	9.018.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan III			Program Perencanaan Aparatur	Bidang Formasi dan pengadaan Pegawai

			41.000.000,00	Melakukan koordinasi dengan instansi Horizontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	16.350.000,00	2.224.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan III	Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan pangkat Golongan telahaan/ijin belum turun dari Bapak Bupati	Dianggarkan pada APBD 2019	Program Pelayanan Aparatur	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
--	--	--	---------------	---	---------------	--------------	-------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	--

HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKSI KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TRIWULAN IV TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (TAHUN) (Rp)	RENCANA AKSI	TRIWULAN IV TAHUN 2018		DATA PENDUKUNG	KENDALA	TINDAK LANJUT	PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	245.755.000,00	Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat dalam peningkatan kompetensi pegawai	-	-	Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV			Program Pendidikan dan Pelatihan	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			424.455.000,00	Melakukan koordinasi dengan instansi Horizontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	-	35.805.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV	Beberapa kegiatan tidak terealisasi	Dirasionalisasi pada APBD Perubahan	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			27.099.500,00	Melakukan koordinasi dengan BKN dan instansi vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	-	8.124.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV			Program Perencanaan Aparatur	Bidang Formasi dan pengadaan Pegawai

			41.000.000,00	Melakukan koordinasi dengan intansi Horisontal maupun vertikal dalam penyelesaian administrasi kepegawaian	1.000.500,00	8.254.000,00	Laporan Evaluasi Renja Triwulan IV			Program Pelayanan Aparatur	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
--	--	--	---------------	--	--------------	--------------	------------------------------------	--	--	----------------------------	--

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2019

.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana Capaian
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan	orang	4
	2 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. II	orang	5
	3 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III	orang	10
	4 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV	orang	30
	5 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Substantif Auditor/P2UPD	orang	42
	6 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor/P2UPD	orang	6
	7 Jumlah PNS yang berprestasi	orang	300
	8 Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	kali	25
	9 Jumlah PNS yang mengikuti seleksi	jabatan	10
	10 Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	kali	2
	11 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	orang	100
	12 Jumlah tersusunnya profil bezeting	dokumen	1
	13 jumlah profil kepegawaian yang disusun	dokumen	1
	14 Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG	orang	5.450
	15 Jumlah formasi ASN yang diusulkan	orang	366
	16 Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	orang	366
	17 Jumlah usul pensiun PNS yang diselenggarakan	orang	171
	18 Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	850
	19 Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	orang	850
	20 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	orang	40
	21 Jumlah penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/kabupaten/Kota	orang	120

	22 Jumlah guru yang mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah	orang	20
--	---	-------	----

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Eselon II

CORE BUSSINES	ISU STRATEGIS/MASALAH STRATEGIS	KINERJA/TUJUAN/SASARAN
1	2	3
Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan di bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur.	1. Belum Optimalnya Sistem Merit dalam Manajemen Kepegawaian	Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian aparatur
	2 Masih rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kompetensi ASN
	3 Belum Optimalnya kualitas pelayanan kepegawaian	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian



INDIKATOR KINERJA
4
Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan
Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web
Persentase peningkatan akurasi dabase kepegawaian
Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP

ESELON III

NAMA JABATAN ESELON III	PERMASALAHAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM	SASARAN CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4
SEKRETARIS	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
	Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana
	Belum optimalnya pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Belum optimalnya pelaksanaan upacara nasional, daerah dan keagamaan	Program pelaksanaan Upacara nasional, daerah dan keagamaan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan upacara nasional, daerah dan keagamaan

NAMA JABATAN ESELON III	PERMASALAHAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM	SASARAN CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4
Kepala Bidang Pengembangan karier dan Diklat	Masih rendahnya kompetensi ASN	Program Pendidikan dan pelatihan	Meningkatnya kualitas ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi
	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kepegawaian	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

NAMA JABATAN ESELON III	PERMASALAHAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM	SASARAN CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4
Kepala Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai	Masih rendahnya kompetensi ASN	Program Perencanaan Aparatur	Meningkatnya kapasitas ASN
	Belum optimalnya akurasi database Kepegawaian		Meningkatnya akurasi database kepegawaian

NAMA JABATAN ESELON III	PERMASALAHAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM	SASARAN CAPAIAN PROGRAM
1	2	3	4
Kepala Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kepegawaian	Program Pelayanan Aparatur	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

INDIKATOR PROGRAM /OUTCOME
5
Persentase Terpenuhinya penunjang administrasi perkantoran
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
Persentase kinerja dan serapan anggaran yang sesuai target
Persentase lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan hari nasional, daerah dan keagamaan

INDIKATOR PROGRAM /OUTCOME
5
Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat Penjenjangan
Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui Diklat Teknis dan Fungsional
Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi
Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu
Persentase peningkatan disiplin ASN

INDIKATOR PROGRAM /OUTCOME
5
Persentase penyusunan formasi pegawai sesuai kebutuhan
Persentase akurasi database kepegawaian dalam SIMPEG

INDIKATOR PROGRAM /OUTCOME
5
Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai SOP

ESELON IV

NAMA JABATAN ESELON IV	PROGRAM	NAMA/JUDUL KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN/OUTPUT
1	2	3	4
Kasubag Umum dan Kepegawaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan benda POS lainnya
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan yang dibutuhkan
		apenyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelaksanaan upacara Nasional, daerah dan Keagamaan	Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium Non PNS	Jumlah biaya honorarium PTT yang dibayar
		Kegiatan pelaksanaan peringatan hari Nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan hari Nasional
		Kegiatan pelaksanaan peringatan Hari Daerah	Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah
		Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan

disesuaikan d

NAMA JABATAN ESELON IV	PROGRAM	NAMA/JUDUL KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN/OUTPUT
2	3	4	5
Kepala Sub. Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Kepala Sub. Bidang Data Kepala Sub. Bidang Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian	Program Perencanaan Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil Penyusunan Bezeting dan Formasi Pembangunan/Pengembangan Informasi Kepegawaian Pendataan dan Penataan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya Jumlah tersusunnya profil bezeting dan disampaikan tepat waktu Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG Jumlah profile kepegawaian yang disusun
Kepala Sub. Bidang Kepangkatan Fungsional Kepala Sub. Bidang Kepangkatan Struktural Kepala Sub. Bidang Pensiun dan Perpindahan Pegawai	Program Pelayanan Aparatur	Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional PNS Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Struktural PNS Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan Penyelenggaraan usul Pensiun PNS Penyelenggaraasn perpindahan wilayah kerja ASN antar Propinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya Jumlah PNS struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas Jumlah SK pensiun PNS yang diterbitkan sesuai usulan tepat waktu Jumlah PNS yang dilayani perpindahan wilayah kerjanya
Kepala Sub. Bidang Diklat Aparatur Kepala Sub. Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Kepala Sub. Bidang Pengembangan Karier	Program Pendidikan dan Pelatihan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bimbingan Teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Diklat Teknis Substantif Spesialisasi dasar (DTSS) penilaian proferti Dasar Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pembinaan dan pengawasan disiplin PNS Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil Pelaksanaan seleksi Daerah jabatan pimpinan tinggi	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang/jasa Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian proferti Jumlah PNS yang berprestasi Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan Jumlah PNS yang disumpah Jumlah PNS yang mengikuti seleksi

		Pelantikan pejabat struktural	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan
		Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam JFT
		Pelaksanaan uji kompetensi jabatan pimpinan tinggi	Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi

CASCADING KINERJA BKDPSDM KABUPATEN BANGLI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI		
TUJUAN 1: Terwujudnya sistem Merit dalam manajemen kepegawaian	TUJUAN 2: Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	TUJUAN 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian
SASARAN 1 : Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian aparatur	SASARAN 2 : Meningkatnya profesionalisme dan kemandirian aparatur	SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian
Indikator :	Indikator :	Indikator :
1.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	2.1 Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web	3.1 Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP
1,1 Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	2,1 Persentase peningkatan akurasi database kepegawaian	

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN DIKLAT		
Sasaran :		
1.1 Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara		
Indikator :		
1.1 Persentase kelulusan ASN yang mengikuti diklat penjurangan		
1.1 Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui diklat teknis dan fungsional		
1.1 Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi		
KASUBID DIKLAT APARATUR	KASUBID PEMBINAAN DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	KASUBID PENGEMBANGAN KARIER
1.1 Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang/jasa	1.1 Jumlah PNS yang berprestasi	1.1 Jumlah PNS yang mengikuti seleksi
1.1 Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	1.1 Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	1.1 Jumlah pelantikan yang dilaksanakan
1.1 Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian proferti	1.1 Jumlah PNS yang disumpah	1.1 Jumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam JFT
		1.1. Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi

KEPALA BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI		
Sasaran :		
2.1 Meningkatnya kapasitas ASN		
2.1 Meningkatnya akurasi database kepegawaian		
Indikator :		
2.1 Persentase penyusunan formasi pegawai sesuai kebutuhan		
2.1 Persentase akurasi database kepegawaian dalam SIMPEG		
KASUBID FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI	KASUBID DATA	KASUBID MONITORING DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN
2.1 Tersedianya dokumen Formasi ASN	2.1 Jumlah Biodata pegawai yang diinfut dalam SIMPEG	2.1 Persentase laporan kepegawaian yang disampaikan tepat waktu
2.1 Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	2.1 Jumlah profil kepegawaian yang diterbitkan	2.1 Jumlah Sosialisasi aturan Kepegawaian yang dilaksanakan
2.1 Jumlah Profil Bezeting yang disusun dan disampaikan tepat waktu		

KEPALA BIDANG MUTASI DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		
Sasaran :		
3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP		
Indikator :		
3.1 Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu		
KASUBID KEPANGKATAN FUNGSIONAL	KASUBID KEPANGKATAN STRUKTURAL	KASUBID PENSIUN DAN PERPINDAHAN PEGAWAI
3.1 Jumlah PNS Fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	3.1 Jumlah PNS Struktural yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	3.1 Jumlah SK Pensiun PNS yang diterbitkan sesuai usulan tepat waktu
	3.1 Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	3.1 Jumlah PNS yang dilayani perpindahan wilayah kerjanya

SEKRETARIS

Sasaran :Warna latar belakang pada tujuan, sasaran, dan indikator menunjukkan kelompok tujuan dan sasaran: merah menunjukkan tujuan dan sasaran 1; kuning tujuan dan sasaran 2; sedangkan biru tujuan dan sasaran 3

Bangli, 2 Oktober 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan
Kabupaten Bangli,



M. Putu Koosalireni, SH., MT
NIP. 196102151992032001

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL RPJMD	2016		2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PD PENANGGU NG JAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1				2		94%	5	6	8	9	5	6	5	6	5	6	5	6	7	8	9
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai dengan Kabupaten/Kota melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu			421.533.855	96%	675.303.544	97%	675.028.400	98%	819.400.000	99%	824.200.000	100%	829.120.000	100%	BKD	Bangli
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Benda pos lainnya	674	674 lembar	3.144.000	1490 lembar	7.095.000	1500 lembar	7.095.000	1550 lembar	8.300.000	1600 lembar	8.500.000	1650 lembar	8.700.000	8.464	BKD	Bangli
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, air, dan listrik	-	12 bulan	10.000.000	12 bulan	21.900.000	48 sambungan	56.000.000	48 sambungan	58.000.000	48 sambungan	60.000.000	48 sambungan	62.000.000	72 bulan	BKD	Bangli
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	9 unit	9 unit	1.900.000	10 unit	4.200.000	10 unit	4.200.000	13 unit	6.600.000	16 unit	7.200.000	19 unit	7.920.000	19 unit	BKD	Bangli
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat kebersihan yang dibutuhkan	-	12 jenis	13.600.000	12 jenis	17.400.000	15 jenis	31.800.000	15 jenis	19.000.000	15 jenis	20.000.000	15 jenis	21.000.000	84 jenis	BKD	Bangli
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	48 unit	9 unit	9.000.000	30 unit	30.000.000	35 unit	30.000.000	37 unit	40.000.000	37 unit	41.000.000	38 unit	42.000.000	234 unit	BKD	Bangli
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	-	37 jenis	24.490.855	61 jenis	73.411.944	59 jenis	72.860.500	61 jenis	76.000.000	61 jenis	76.000.000	61 jenis	76.000.000	342 jenis	BKD	Bangli
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	-	6 jenis	11.400.000	5 jenis	12.500.000	12 jenis	15.000.000	12 jenis	13.000.000	12 jenis	13.000.000	12 jenis	13.000.000	59 jenis	BKD	Bangli
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	12 bulan	2.319.000	12 jenis	3.000.000	12 jenis	3.140.900	12 jenis	3.500.000	12 jenis	3.500.000	12 jenis	3.500.000	60 jenis	BKD	Bangli
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 unit	7 unit	36.900.000	11 unit	75.000.000	11 unit	75.000.000	11 unit	75.000.000	11 unit	75.000.000	11 unit	75.000.000	62 unit	BKD	Bangli
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1 jenis	5.000.000	2160 eks	5.652.000	2160 eks	5.652.000	2160 eks	6.000.000	2160 eks	6.000.000	2160 eks	6.000.000	10800 eks	BKD	Bangli
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	-	550 kotak	11.780.000	993 kotak	12.930.000	1000 kotak	13.320.000	1000 kotak	14.000.000	1000 kotak	14.000.000	1000 kotak	14.000.000	5543 kotak	BKD	Bangli
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah biaya perijalan dinas	-	1 Tahun	292.000.000	1 Tahun	412.214.600	1 Tahun	360.960.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	500.000.000	1 tahun	500.000.000	6 tahun	BKD	Bangli

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94%	95%	109.982.500	96%	153.023.218	97%	241.023.218	98%	262.000.000	99%	262.499.999,52	100%	272.750.000	100%	BKD	Bangli
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2	8 unit	-	-	-	-	3 unit	65.000.000	3 unit	65.000.000	3 unit	65.000.000	3 unit	71.500.000	20 unit	BKD	Bangli
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 unit	10 unit	25.400.000	-	-	10 unit	13.000.000	10 unit	27.000.000	10 unit	27.500.000	10 unit	30.250.000	52 unit	BKD	Bangli
				Pengadaan meubeler	Jumlah tersedianya meubeler	32 unit	-	-	-	-	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	10.000.000	3 unit	11.000.000	44 unit	BKD	Bangli
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	2 unit	84.582.500	2 unit	153.023.218	2 unit	153.023.218	2 unit	160.000.000	2 unit	159.999.999,52	2 unit	160.000.000	14 unit	BKD	Bangli
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	94%	95%	165.990.744	96%	161.190.744	97%	161.190.744	98%	170.000.000	99%	170.000.000	100%	170.000.000	100%	BKD	Bangli
				Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah	Jumlah biaya honorarium satuan pengelola keuangan daerah	-	10 orang	94.680.000	10 orang	89.880.000	10 orang	89.880.000	10 orang	95.000.000	10 orang	95.000.000	10 orang	95.000.000	60 orang	BKD	Bangli
				Kegiatan penyediaan kesejahteraan honorarium non PNS	Jumlah biaya honorarium PTT	-	6 orang	71.310.744	6 orang	71.310.744	6 orang	71.310.744	6 orang	75.000.000	6 orang	75.000.000	6 orang	75.000.000	36 orang	BKD	Bangli
				Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan	Persentase Lancarnya pelaksanaan kegiatan peringatan hari nasional, daerah dan keagamaan	94%	95%	26.800.000	96%	32.000.000	97%	58.400.000	98%	38.000.000	99%	38.000.000	100%	41.000.000	100%	BKD	Bangli
				Kegiatan pelaksanaan peringatan hari nasional	Jumlah pelaksanaan peringatan hari nasional	-	2 jenis	6.400.000	1 kali	7.000.000	1 kali	9.500.000	1 kali	8.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	9.000.000	6 kali	BKD	Bangli
				Kegiatan pelaksanaan peringatan hari daerah	Jumlah pelaksanaan peringatan hari daerah	-	2 jenis	6.400.000	1 kali	5.000.000	1 kali	5.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	8.000.000	1 kali	9.000.000	6 kali	BKD	Bangli
				Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	-	12 bulan	14.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	43.900.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	22.000.000	12 bulan	23.000.000	72 bulan	BKD	Bangli
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	2424	20%	1.226.931.700	34%	193.484.000								54%	BKD	Bangli	
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan	5 orang	1 paket	30.000.000	5 orang	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 orang	BKD	Bangli

				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	200 orang	45 skpd	60.000.000	100 orang	24.559.000	-	-	-	-	-	-	200 orang	BKD	Bangli		
				Pengambilan sumpah PNS	PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	146 orang	146 orang	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	146 orang	BKD	Bangli		
				Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	3 kali	1 tahun	12.800.000	2 kali	18.925.000	-	-	-	-	-	-	3 kali	BKD	Bangli		
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan III	CPNS Gol III yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan - aturan kepegawaian	461 orang	111 orang	888.386.500	350 orang	-	-	-	-	-	-	-	461 orang	BKD	Bangli		
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II	CPNS Gol II yang mengikuti pendidikan untuk memahami aturan - aturan kepegawaian	70 orang	35 orang	232.745.200	35 orang	-	-	-	-	-	-	-	70 orang	BKD	Bangli		
				Program Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	21%			6,0%	-	11%	6.985.099.100	18%	5.729.757.000	20%	5.439.163.088	24,0%	4.477.935.675	100%	BKD	Bangli
				Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II	6 orang	10 orang	377.460.000	7 orang	-	-	-	5 orang	151.305.000	10 orang	174.000.750	15 orang	191.400.825	47 orang	BKDPSM	Bangli
				Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III	45 orang	30 orang	934.593.800	30 orang	-	-	-	10 orang	221.250.000	20 orang	254.437.500	25 orang	279.881.250	115 orang	BKDPSDM	Bangli
				Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. IV	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	606.900.000	60 orang	697.935.000	75 orang	767.728.500	165 orang	BKDPSDM	Bangli
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan	107 orang	-	-	-	-	85 orang	400.000.000	105 orang	400.000.000	105 orang	410.000.000	105 orang	500.000.000	527 orang	BKD	Bangli
				Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Lulusnya PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa	107 orang	-	-	-	-	50 orang	76.000.000	-	-	-	-	-	-	105 orang	BKD	Bangli
				Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	197 orang	-	-	-	-	45 orang	283.300.000	365 orang	2.184.070.000	365 orang	2.023.925.000	365 orang	2.184.070.000	1337 orang	BKD	Bangli
				Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat pim	189 orang	-	-	117 orang	-	105 orang	6.156.799.100	80 orang	2.166.232.000	80 orang	1.878.864.838	17 orang	554.855.100	399 orang	BKD	Bangli

				Diklat Teknis Substansif Spesialisasi (DTSS) Penilaian Proferti Dasar	Jumlah PNS yang mengikuti diklat penilaian properti	-	-	-	30 orang	-	3 orang	69.000.000	-	-	-	-	-	33 orang	BKD	Bangli
			Program Pembinaan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang dibina	18,90%	26%	2.087.495.844	12,9%	602.057.600	4%	633.481.900	4%	776.790.000	4%	638.620.000	4%	964.620.000	100%	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. II	6 orang	10 orang	377.460.000	7 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Orang	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. III	Jumlah PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. III	45 orang	30 orang	934.593.800	30 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 orang	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas	3 kali	2 kali	6.000.000	1 kali	3.567.400	-	-	-	-	-	-	-	-	3 kali	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	370 orang	-	-	100 orang	37.763.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	BKD	Bangli
			Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Formasi yang diusulkan	197 orang	366 orang	200.984.800	410 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600 orang	BKD	Bangli
			Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	197 orang	366 orang	58.698.000	410 orang	21.207.200	-	-	-	-	-	-	-	-	485 orang	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan usul pensiun PNS	Jumlah usul pensiun PNS yang disenggarakan	640 orang	128 orang	20.000.000	120 orang	25.737.600	-	-	-	-	-	-	-	-	248 orang	BKD	Bangli
			Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	Jumlah tersusunnya profil bezetting	5 dokumen	6140 orang	85.482.000	1 dokumen	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	BKD	Bangli
			Penyelenggaraan kenaikan pangkat fungsional dan kenaikan pangkat struktural PNS	Jumlah PNS fungsional yang difasilitasi usulan kenaikan pangkatnya	6800 orang	1500 orang	72.553.444	1600 orang	23.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1400 orang	BKD	Bangli
			Optimalisasi fungsi pelayanan pada pegawai	Jumlah pegawai yang difasilitasi usulan jabatannya	1260 orang	1 paket	10.000.000	1000 orang	3.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2000 orang	BKD	Bangli
			Pendataan dan penataan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangli	Jumlah profil kepegawaian yang disusun	6 dokumen	60 buku	60.000.000	1 dokumen	27.878.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	BKD	Bangli
			Monitoring dan evaluasi penataan PNS	Prosentase validitas data kepegawaian	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	BKD	Bangli
Penyelenggaran Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam simpeg	5450 orang	-	-	5978 org	60.914.800	-	-	-	-	-	-	-	-	5978 orang	BKD	Bangli			

				Penyelenggaraan perindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	100 orang	-	-	100 orang	4.190.200	-	-	-	-	-	-	-	100 orang	BKD	Bangli	
				Pengambilan sumpah PNS	PNS yang mengikuti pengambilan sumpah	2450 orang	-	-	-	-	300 orang	1.600.000	300 orang	3.450.000	300 orang	3.720.000	300 orang	4.770.000	1200 orang	BKD	Bangli
				Pelantikan Pejabat Struktural	Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	10 kali	-	-	-	-	2 kali	16.312.400	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	8 kali	BKD	Bangli
				Bantuan Dana Pendidikan bagi ASN	Presentase PNS yang diberikan bantuan	175 orang	-	-	35 orang	-	35 orang	182.500.000	35 orang	287.500.000	35 orang	310.000.000	35 orang	397.500.000	175 orang	BKD	Bangli
				Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang berprestasi	1268 orang	1 tahun	1.638.800	-	-	200 orang	13.480.000	200 orang	23.200.000	200 orang	29.600.000	200 orang	41.400.000	1000 orang	BKD	Bangli
				Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan	jumlah pns yang diangkat dan diberhentikan	1000 orang	-	-	-	-	250 orang	11.869.500	250 orang	15.000.000	250 Orang	1.500.000	250 orang	1.500.000	1000 orang	BKD	Bangli
				Pembinaan dan Pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	Frekwensi sidak PNS yang dilaksanakan	300 kali	1 paket	21.561.000	50 kali	33.695.000	25 kali	3.420.000	50 kali	40.600.000	50 kali	51.800.000	50 kali	72.450.000	300 kali	BKD	Bangli
				Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	Jumlah PNS yang Mengikuti Seleksi		5 orang	238.524.000	7 orang	169.763.000	63 orang	330.300.000	60 orang	167.040.000	60 orang	222.000.000	60 orang	207.000.000	255 orang	BKD	Bangli
				Pelaksanaan uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi				23 orang	155.860.000	21 orang	74.000.000	30 orang	220.000.000	-	-	30 orang	220.000.000	95 orang	BKD	Bangli
				Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100%	6500 org	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BKD	Bangli
				Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah biodata pegawai yang diinfut dalam simpeg	-	6500 org	145.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6500 orang	BKD	Bangli
				Program Perencanaan Aparatur	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan aparatur	86,87%	87,86%		88,12%		87,86%	308.777.100	87,86%	571.235.200	87,86%	730.995.200	87,86%	781.078.200	100%	BKD	Bangli
				Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	Formasi yang diusulkan	197 orang	-	-	-	-	365 orang	175.047.100	365 orang	286.840.000	365 orang	431.600.000	365 orang	456.683.000	2433 orang	BKD	Bangli
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	100 orang	-	-	-	-	100 orang	12.800.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	100 orang	30.000.000	400 orang	BKD	Bangli
				Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	Jumlah CPNS yang difasilitasi pemberkasannya	300 orang	-	-	-	-	365 orang	24.000.000	365 orang	35.000.000	365 orang	35.000.000	365 orang	50.000.000	2433 orang	BKD	Bangli

				Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	100%	-	-	-	-	-	40%	218.500.000	40%	251.275.000	20%	288.966.250	60 orang	BKDPSDM	Bangli
				Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Jumlah guru yang mengikuti diklat calon kepala sekolah	60 orang	-	-	-	-	-	20 orang	218.500.000	20 orang	251.275.000	20 orang	288.966.250	60 orang	BKDPSDM	Bangli
J U M L A H								4.183.734.643		1.817.059.106		9.325.000.462		9.111.422.200		8.953.508.287,52		8.495.326.375		



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. BANGLI

[Signature]

NI PUTU KOESALIRENI, SH., MT.
NIP-19610215 199203 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 30 Bangli - 80613
Telp.(0366) 91011, 91032, 91133 Fax .(0366) 93048 Kode Pos. 80661
BANGLI

KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BANGLI
NOMOR 04.1 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, BKD Kabupaten Bangli wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa dengan adanya perubahan undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya BKD Kabupaten Bangli maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan BKD Kabupaten Bangli ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

20. Peraturan Menteri

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 44 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 44).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BKD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

Pasal 1

- (1) Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh BKD Kabupaten Bangli untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja BKD Kabupaten Bangli;
- (2) mengukur.....
- (2) mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, serta Penetapan Kinerja guna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKD Kabupaten Bangli;

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Bangli.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA BKD Kabupaten Bangli. :

- a. BKD Kabupaten Bangli melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas.
- b. Minimal 3 bulan sekali, melaporkan kepada Bupati dengan tembusan pada Bappeda dan PM dan Inspektorat Kabupaten Bangli tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program BKD Kabupaten Bangli..

Pasal 4

Naskah indikator Kinerja Utama di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala BKD Kabupaten Bangli

Pasal 5

Keputusan Kepala BKD Kabupaten Bangli ini mulai berlaku sejak tanggal disyahkan oleh Bupati Bangli

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Januari 2017
Kepala BKD Kab. Bangli



★ NIPUTU KOESALIRENI, SH.,MT
NIP. 196102151992032001

LAMPIRAAN : KEPUTUSAN KEPALA BKD KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 04.1 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
DI LINGKUNGAN BKD KABUPATEN BANGLI

- 1

Nama Organisasi

:

BKD Kabupaten Bangli
- 2

Tugas

:

.....
- 3

Fungsi

:

1)

penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;

2)

perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;

3)

penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;

4)

penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5)

pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

6)

penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

7)

penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

8)

penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan

9)

pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BANGLI

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan Web	Jumlah layanan yang menggunakan Web / jumlah pelayanan kepegawaian x 100 %	APBD	Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	Jumlah pelayanan sesuai SOP / Jumlah pelayanan x 100 %	APBD	Semua Bidang pada BKDPSDM Kabupaten Bangli
			Jumlah jabatan fungsional dalam struktur organisasi PD	Jumlah jafung dlm struktur organisasi PD / jumlah pegawai dalam OPD x 100 %	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	(Jlh struktur jabatn yg terisi / Jlh struktur jabtn yg tersdia) x 100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	(Jlh pejabat yg memenuhi persyaratan pddk formal /Jlh total pejabt OPD yg ada) x100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaraatn pendidikan pelatihan kepemimpinan	(Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan / jumlah total pejabat OPD yg ada) x 100%	APBD	Bidang Pengembangan Karier dan Diklat
			Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	(Jlh pejabat yg memenuhi persyaratn kepangktn / Jlh total pejabt OPD yg ada) x 100%	APBD	Bidang Mutasi dan Administrasi Kepegawaian
			Persentase anggaran yg digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	(alokasi anggaran peningkatan kualits SDM / nilai APBD utk SKPD) x 100%	APBD	Semua Bidang pada BKDPSDM Kabupaten Bangli

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli,


Ni Putu Koesalireni, SH.,MT
NIP. 196102151992032001

RENCANA PENCAPAIAN IKU BKD KABUPATEN BANGLI

No	Urusan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Tahun						
					Data Awal Renstra/ RPJMD Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Akhir Renstra/ RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan web	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	orang	-	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang
			Pendataan dan penataan PNS Kab. Bangli	buku	-	60 buku	75 buku	350 buku	350 buku	350 buku	350 buku
2		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS	orang	-	80	120	122	171	160	187
			Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional dan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	orang	-	1500	1600	1700	1900	2000	2100
			Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	orang	-	100	100	100	90	90	90
			Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	orang	-	-	100	110	120	130	135

			Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	orang	1.200	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
			Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	orang	185	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
			Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	orang	5.982	1 paket	6140	6280	6400	6500	6550
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	UU Kepeg	-	45 SKPD	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg
			Optimalisasi fungsi pelayanan kepada pegawai	orang	6.000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
			Pengambilan sumpah PNS	orang	2.035	185	350	300	300	300	300
			Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	orang	1.200	200	200	200	200	200	200
			Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	kali	7	2	1	1	1	1	1
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan III	orang	1.961	111	350	300	300	300	300
			Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II	orang	210	35	35	35	35	35	35
			Pembinaan dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	orang	300	50	50	50	50	50	50
			Monitoring dan evaluasi pendataan dan penataan PNS	buku	-	-	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku
3		Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Pendidikan dan pelatihan formal	orang	30	2	5	5	5	5	5
4		% struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	kali	12	2	2	2	2	2	2

5		% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	kali	22	2	5	5	2	4	4
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II	orang	10	10	7	6	-	-	-
			Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	orang	30	30	30	19	-	-	-


 Kepala BKD
 Kabupaten Bangli
 Ni Putu Koesalireni, SH.,MT
 NIP. 196102151992032001

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA PD (IKU)		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase layanan pegawai yang telah menggunakan web	Pengembangan sistem informasi kepegawaian	-	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	6087 orang	36522 orang
		Pendataan dan penataan PNS Kab. Bangli	-	60 buku	75 buku	350 buku	350 buku	350 buku	350 buku	1535 buku
2	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan sesuai SOP	Penyelenggaraan Usul Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS	-	80	120	122	171	160	187	100%
		Penyelenggaraan Kenaikan Pangkat Fungsional dan Kenaikan Pangkat Struktural PNS	-	1500	1600	1700	1900	2000	2100	100%
		Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	-	100	100	100	90	90	90	100%
		Penyelenggaraan perpindahan wilayah kerja PNS antar Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	100	110	120	130	135	100%
		Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	1200 orang	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	1850 formasi
		Pemberkasan Calon Pegawai Negeri Sipil	185 orang	1 paket	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	2035 orang

NO	INDIKATOR KINERJA PD (IKU)		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Penyusunan bezetting dan formasi pegawai	5982 orang	1 paket	6.140	6.280	6.400	6.500	6.550	7.832
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	45 skpd	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	1 UU Kepeg	6 UU Kepeg
		Optimalisasi fungsi pelayanan kepada pegawai	6000 orang	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000
		Pengambilan sumpah PNS	2035 orang	185	350	300	300	300	300	1735
		Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	1200 orang	200	200	200	200	200	200	1200
		Penyelenggaraan ujian dinas kenaikan pangkat golongan	7 kali	2	1	1	1	1	1	7 kali
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan III	1961	111	350	300	300	300	300	1661
		Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah Golongan II	210	35	35	35	35	35	35	210
		Pembinaan dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil	300	50	50	50	50	50	50	300
		Monitoring dan evaluasi pendataan dan penataan PNS	-		50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	250 buku

NO	INDIKATOR KINERJA PD (IKU)		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3	Ada tidaknya jabatan fungsional dalam struktur oranisasi SKPD	Pendidikan dan pelatihan formal	30 orang	2	5	5	5	5	5	27
4	% struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli	12 kali	2	2	2	2	2	2	12
		Pelaksanaan seleksi daerah jabatan pimpinan tinggi	22 kali	2	5	5	2	4	4	22
5	% pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II	23 orang	10	7	6	-	-	-	23
		Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III	79	30	30	19	-	-	-	79